

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: SEBUAH TINJAUAN LINTAS KASUS DI INDONESIA

**Hasinggan Jhon Babtista Tamba¹, Dinda Atika Sari², Zikra Nurul Anisa³,
Renny Maisyarah⁴**

jbabtista97@gmail.com¹, saridindaatika054@gmail.com², zikranurulanisa@gmail.com³,
rennymaisyarah@gmail.com⁴

Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis temuan-temuan dari lima studi kasus tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Berbagai daerah seperti Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Karanganyar, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Buleleng menjadi lokus kajian. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif dari masing-masing studi, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil sintesis menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukanlah konsep yang berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi (SIPD RI), sistem pengendalian internal (SPI), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta peran aktif pengawasan (DPRD, Inspektorat, BPK, dan masyarakat). Meskipun banyak daerah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tantangan substantif seperti keterbatasan literasi publik, penyajian informasi yang teknokratis, dan kesenjangan digital masih menghambat terciptanya tata kelola yang sepenuhnya transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, LKPD, SIPD, Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan publik secara mandiri. Namun, kewenangan ini harus diimbangi dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama good governance (Mardiasmo, 2018). Transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi keuangan, sementara akuntabilitas mewajibkan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana publik (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen vital untuk mewujudkan kedua prinsip tersebut. Sayangnya, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Mulai dari keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya sistem pengendalian internal, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, hingga minimnya partisipasi publik dalam pengawasan anggaran (Rohani Zega dkk., 2025; Nasution & Nurwani, 2021). Bahkan di daerah yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekalipun, masih ditemukan catatan substantif terkait keterbukaan informasi yang belum menjangkau masyarakat luas.

Artikel ini bertujuan untuk mensintesis temuan dari lima studi kasus di berbagai daerah di Indonesia—Nias Utara, Karanganyar, Medan, Tebing Tinggi, dan Buleleng—guna mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan pendekatan tinjauan lintas kasus, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang kesenjangan antara kepatuhan formal dan transparansi substantif, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat sipil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sintesis atau meta-sintesis kualitatif. Data utama berasal dari lima artikel jurnal yang telah ditelaah, yang masing-masing menggunakan metode penelitian yang berbeda (kualitatif studi kasus, kuantitatif deskriptif, serta wawancara mendalam). Sintesis dilakukan dengan membandingkan, mengkritisi, dan menggabungkan temuan-temuan utama dari setiap studi untuk menghasilkan proposisi yang lebih umum tentang kondisi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah sintesis temuan dari kelima studi yang dirangkum dalam Tabel 1 dan pembahasan tematik.

Lokus Penelitian	Opini/Status	Faktor Pendukung Utama	Faktor Penghambat Utama	Temuan Utama tentang Transparansi & Akuntabilitas
Kab. Nias Utara	WDP (menuju WTP)	Kepatuhan formal pada SAP, opini BPK, komitmen Pemda	Rendahnya literasi digital masyarakat, teknologi terbatas, partisipasi publik rendah	Transparansi formal tercapai, namun substantif masih lemah. Belum ada strategi komunikasi publik yang efektif.
Kab. Karanganyar	WTP (9x berturut-turut)	SDM memadai, disiplin tinggi, komunikasi efektif dengan SKPD	Pergantian kepemimpinan (Plt), belum ada bimtek teknis SIPD RI yang mendalam, ketergantungan pada SIMDA	Siap secara administratif & kelembagaan untuk SIPD RI, namun perlu sosialisasi dan penyederhanaan informasi untuk publik.
Kota Medan	Uji Coba SIPD	SDM muda & kompeten, dukungan sarana prasarana	Jaringan error, banyaknya menu input menyebabkan kesalahan, belum terbiasa	Implementasi SIPD masih terkendala teknis (sistem error, lambat), menyebabkan keterlambatan pembayaran (SPM, SP2D).
Kota Tebing Tinggi	WTP	SDM, Teknologi Informasi berpengaruh signifikan secara parsial	SPI dan penerapan SAP secara parsial tidak berpengaruh signifikan	Secara simultan (bersama-sama), keempat faktor (SDM, SPI, SAP, TI) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan.
Kab. Buleleng	WTP (2014-2019)	Transparansi & Pengawasan Keuangan	Realisasi pendapatan belum tercapai, potensi pajak hilang	Kualitas laporan sangat ditentukan oleh keterbukaan informasi dan pengawasan yang

Lokus Penelitian	Opini/Status	Faktor Pendukung Utama	Faktor Penghambat Utama	Temuan Utama tentang Transparansi & Akuntabilitas
		berpengaruh positif signifikan		ketat oleh pimpinan/inspektorat.

Dilema Transparansi Antara Formalitas dan Substansi

Sintesis terhadap lima studi kasus mengungkapkan adanya kesenjangan antara transparansi formal (kepatuhan administratif) dan transparansi substantif (dapat dipahami dan dimanfaatkan publik). Di Kabupaten Nias Utara, LKPD telah dipublikasikan melalui situs PPID sesuai regulasi, namun masyarakat dan LSM mengaku sulit mengakses dan memahami laporan karena formatnya terlalu teknis. Kabupaten Karanganyar telah meraih opini WTP sembilan kali, tetapi belum memiliki mekanisme penyederhanaan informasi keuangan untuk konsumsi publik. Kota Medan justru menghadapi kendala teknis SIPD yang menyebabkan keterlambatan penerbitan dokumen keuangan, sehingga informasi yang seharusnya transparan menjadi tidak tepat waktu. Sementara itu, Kota Tebing Tinggi membuktikan secara kuantitatif bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan, namun tanpa disertai literasi publik, transparansi hanya berhenti di tataran angka. Kabupaten Buleleng yang juga beropini WTP masih memiliki catatan realisasi pendapatan yang belum mencapai target, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya diiringi akurasi.

Kekurangan utama dari transparansi formal ini adalah rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan anggaran, karena masyarakat tidak memahami data yang disajikan. Pengaruhnya terhadap akuntabilitas menjadi terbatas; laporan keuangan hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban kepada BPK dan DPRD, bukan alat kontrol sosial yang efektif. Akibatnya, potensi penyalahgunaan anggaran masih tetap ada, kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya pulih, dan tujuan good governance sulit tercapai secara optimal.

Teknologi Informasi dan Implementasi SIPD

Pergeseran dari aplikasi SIMDA/FMIS ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menciptakan integrasi data keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Namun, implementasinya di berbagai daerah menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara harapan dan realita. Di beberapa daerah, kesiapan internal instansi keuangan tergolong memadai, namun proses penatausahaan dan akuntansi masih bergantung pada aplikasi lama karena keterbatasan bimbingan teknis SIPD RI yang mendalam. Sebaliknya, di daerah lain, penerapan SIPD justru menjadi sumber kendala baru: jaringan internet yang sering error, banyaknya menu input yang rumit, dan ketidaksiapan sistem menyebabkan keterlambatan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Hambatan teknis seperti sulitnya penginputan data, waktu respons sistem yang lambat, serta ketidakstabilan koneksi menjadi keluhan umum di sejumlah pemerintah daerah.

Lebih lanjut, keterbatasan akses teknologi dan rendahnya literasi digital pegawai di beberapa wilayah tertinggal menghambat optimalisasi SIPD. Meskipun demikian, bukti kuantitatif menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh paling dominan terhadap kualitas laporan keuangan dibandingkan variabel lainnya seperti kompetensi SDM atau sistem pengendalian internal. Dengan kata lain, teknologi berperan sebagai katalisator percepatan dan akurasi pelaporan. Kesimpulannya, meskipun SIPD RI

menjanjikan efisiensi dan transparansi, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia yang berkelanjutan, serta pendampingan teknis yang intensif dari pemerintah pusat kepada daerah

Peran Ganda Faktor Manusia (SDM) dan Pengendalian Internal (SPI)

Sintesis terhadap lima studi kasus menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan sistem pengendalian internal (SPI) memiliki peran ganda yang saling mempengaruhi dalam menentukan kualitas laporan keuangan daerah. Di Kabupaten Nias Utara, rendahnya kompetensi teknis staf keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memahami akuntansi berbasis akrual menjadi penyebab utama terjadinya selisih pencatatan dan ketidakakuratan data. Hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan internal dari Inspektorat yang belum optimal dalam menindaklanjuti temuan.

Sebaliknya, di Kabupaten Karanganyar, SDM yang berkompeten dan disiplin tinggi menjadi kunci keberhasilan meraih opini WTP sembilan kali berturut-turut. SPI yang berjalan efektif melalui rekonsiliasi berkala turut mendukung akurasi laporan. Namun, tantangan muncul saat pergantian kepemimpinan yang mempengaruhi stabilitas kebijakan.

Di Kota Tebing Tinggi, penelitian kuantitatif justru menemukan bahwa SPI secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini diduga karena SPI sudah dianggap sebagai rutinitas biasa oleh pegawai, sehingga efektivitasnya menurun. Sementara itu, di Kota Medan, SDM muda yang potensial belum mampu mengatasi kendala teknis SIPD karena kurangnya pendampingan teknis. Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa pengawasan keuangan (bagian dari SPI) berpengaruh positif signifikan, terutama ketika pimpinan aktif melakukan pengawasan melekat. Dengan demikian, efektivitas SDM dan SPI sangat tergantung pada konteks organisasi, kepemimpinan, serta kesinambungan pelatihan dan pengawasan.

Akuntabilitas Tidak Cukup Hanya dengan Opini WTP

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering dijadikan tolok ukur keberhasilan akuntabilitas keuangan daerah. Namun, sintesis terhadap lima studi kasus menunjukkan bahwa opini WTP belum menjamin akuntabilitas yang substantif dan partisipatif. Di Kabupaten Karanganyar yang meraih WTP sembilan kali berturut-turut, belum ada mekanisme aktif untuk menyosialisasikan hasil evaluasi laporan keuangan kepada masyarakat luas, sehingga publik tidak mengetahui sejauh mana kualitas pengelolaan anggaran. Kabupaten Buleleng juga beropini WTP, namun masih memiliki catatan realisasi pendapatan yang belum mencapai target dan potensi pajak yang hilang, mengindikasikan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya diiringi kinerja fiskal yang optimal.

Di Kabupaten Nias Utara yang masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP), DPRD mengakui belum ada tindak lanjut yang sistematis untuk menyampaikan temuan audit kepada konstituen. Kota Medan menghadapi kendala teknis SIPD yang menyebabkan keterlambatan penerbitan SPM dan SP2D, sehingga akuntabilitas terganggu karena ketidaktepatwaktuan informasi. Sementara itu, Kota Tebing Tinggi secara kuantitatif membuktikan bahwa akuntabilitas dipengaruhi secara simultan oleh SDM, SPI, SAP, dan teknologi, namun tanpa partisipasi publik, akuntabilitas hanya bersifat vertikal ke atasan, bukan horizontal ke masyarakat. Dengan demikian, opini WTP hanyalah syarat minimal, bukan tujuan akhir. Akuntabilitas sejati membutuhkan keterbukaan, partisipasi aktif masyarakat, serta tindak lanjut yang nyata atas setiap temuan dan rekomendasi

KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis kelima jurnal, disimpulkan bahwa:

1. Transparansi di Indonesia masih berada pada tahap administrasi/kepatuhan.

- Dibutuhkan inovasi dalam penyajian data (visualisasi, ringkasan eksekutif, forum publik) untuk menjembatani kesenjangan dengan pemahaman masyarakat.
2. Akuntabilitas dipengaruhi secara simultan oleh SDM, TI (SIPD), SPI, dan SAP. Penggunaan teknologi baru (SIPD RI) membawa potensi besar untuk integrasi data, namun risiko teknis (error, downtime) dan kesiapan SDM adalah tantangan nyata di daerah seperti Medan.
 3. Daerah dengan opini WTP sekalipun (Buleleng, Karanganyar, Tebing Tinggi) masih memiliki "pekerjaan rumah" terkait partisipasi publik dan edukasi fiskal, sementara daerah dengan WDP (Nias Utara) harus fokus pada perbaikan dasar pencatatan dan infrastruktur TI.

Rekomendasi

1. Pemerintah Pusat (Kemendagri & BPKP): Wajib menyediakan technical support yang masif dan user manual yang mudah dipahami untuk SIPD RI. Jangan hanya mengandalkan sosialisasi daring.
2. Pemerintah Daerah seperti, Nias Utara & Medan memilikiTingkatkan pelatihan teknis SAP berbasis akrual untuk staf OPD. Bangun infrastruktur jaringan internet yang stabil, sedangkan Karanganyar, Tebing Tinggi, Buleleng masih mengembangkan "LKPD Sederhana" (infografis, laporan naratif) untuk publik. Libatkan LSM dan perguruan tinggi dalam social auditing.
3. Masyarakat dan LSM: Tingkatkan literasi keuangan daerah melalui inisiatif mandiri. Gunakan hak akses informasi (UU KIP) untuk meminta data publik secara proaktif, tidak hanya menunggu disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armanda, D., Purba, R. B., & Maisyarah, R. (2025). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1).
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1).
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2).
- Rahayu, K. N. S., & Dewi, L. G. K. (2021). Pengaruh Transparansi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (disingkat sesuai sumber)*.
- Zega, R., Telaumbanua, A., Bate'e, M. M., & Gulo, H. (2025). Analisis Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara: Studi Kasus pada BPKPD Kabupaten Nias Utara. *Economics and Digital Business Review*, 7(1), 361-379.